

## **ANALISIS *FRAMING* PEMBERITAAN PP NO. 43/ 2018 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI MEDIA *ONLINE* KOMPAS. COM**

**<sup>1</sup>Ines Nur Affifah, <sup>2</sup>Nurdin**

<sup>1,2</sup>Program Studi Ilmu Komunikasi

Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email: inesnuraffifah97@gmail.com

### **ABSTRAK**

Pemberitaan mengenai Peraturan Pemerintah No. 43/ 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah disahkan oleh Presiden Joko Widodo menjadi topik menarik untuk dibahas di media massa. Salah satu media yang turut memberitakan mengenai kehadiran Peraturan Pemerintah tersebut adalah media *online* Kompas.com. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Kompas.com membingkai pemberitaan tentang Peraturan Pemerintah No. 43/ 2018 yang terbit selama bulan Oktober 2018. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan metode analisis *framing* Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki yang mencakup empat struktur yaitu Sintaksis bagaimana cara wartawan menyusun fakta, Skrip bagaimana cara wartawan mengisahkan fakta, Tematik bagaimana cara wartawan menulis fakta, retorik bagaimana cara wartawan menekankan fakta pada setiap berita. Penelitian ini didukung dengan menggunakan teori *framing* sebagai teori efek media. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari tujuh berita yang dianalisis, Kompas.com lebih menonjolkan tentang isi pasal yang mengatur soal imbalan uang dan bentuk perlindungan yang diberikan bagi pelapor kasus korupsi dengan mengkaji mengenai sebab- akibat dari diterbitkannya Peraturan Pemerintah tersebut melalui pernyataan sumber yang pro dan kontra, dalam pemberitaan ini Kompas.com berupaya memperkecil dan mengaburkan pengaruh kepentingan media dengan kepentingan ekonomi dan politiknya dalam memberitakan PP No. 43 tahun 2018 dilihat dari pengambilan pernyataan sumber yang beragam.

**Kata kunci:** *Analisis Framing, PP No. 43/2018, Kompas.com*

### **Pendahuluan**

Di era demokrasi kebebasan pers dan tingginya angka penggunaan media *online* di Indonesia saat ini telah menimbulkan berbagai macam isu dan fenomena yang mewarnai dunia media massa, salah satunya dalam hal penyebaran berita. Tren pemberitaan dalam bentuk *online* saat ini sering kali mengakibatkan semakin banyaknya tersebar berita *hoax*, berita *clickbait* dengan judul yang berlebihan namun tidak sesuai dengan isi beritanya. Disamping itu bahkan saat ini informasi yang disampaikan oleh media sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan informasi masyarakat karena pengaruh dari kepentingan para penguasa yang ada dibalik media itu sendiri. Meskipun sikap independen dan objektif menjadi pegangan setiap jurnalis, namun kenyataannya saat ini seringkali didapati suguhan berita yang beraneka warna dari sebuah peristiwa yang sama. Diangkat dari peristiwa yang sama, setiap media mewartakannya dengan cara menonjolkan sisi atau aspek tertentu, sedangkan yang lainnya meminimalisir, memelintir bahkan menutup sisi atau aspek tersebut, dan sebagainya. Ini semua menunjukkan dibalik jubah kebebasan, independensi dan objektivitas, seorang jurnalis menyimpan paradoks, tragedi bukan ironi.

Media sejatinya berada di tengah realitas sosial yang sarat akan kepentingan, konflik dan fakta yang kompleks dan beragam. Sehingga media memiliki kemampuan dalam menciptakan opini publik.<sup>2</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan Analisis *Framing* model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki, karena dalam model ini menjelaskan sebuah model yang sangat detail dalam melihat sebuah pembingkai berita. Dengan menggunakan empat struktur yaitu: *sintaksis* (cara wartawan menyusun fakta), *Skrip* (cara wartawan engisahkan fakta), *Tematik* (cara wartawan menulis fakta), dan *Retoris* (cara wartawan menemukan fakta).

Subjek dari penelitian ini adalah media *online* Kompas.com yang bersekala nasional dan juga menjadi salah satu media yang banyak membahas tentang PP No. 43/2018 ini. Kompas.com juga dipilih menjadi subjek penelitian karena peneliti ingin melihat bagaimana media *online* Kompas.com yang dimiliki dan didirikan oleh Jacob Oetama dan P.K Ojong yang memiliki latar belakang bukan dari anggota partai dan pemerintahan, dalam menyajikan pemberitaan yang berkaitan tentang PP no.43/ 2018 ini di tengah maraknya kepentingan politik ekonomi media massa yang terjadi di Indonesia ditambah lagi PP ini diberitakan pada saat masa kampanye calon Presiden 2019.

Sedangkan objek dari penelitian, peneliti mengambil pemberitaan tentang PP No.43/2018 Yang telah disahkan pada tanggal 18 September 2018 oleh Presiden Joko Widodo tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang menjadi isu penting bagi media untuk dipublikasikan kepada masyarakat, karena PP ini menyangkut keikutsertaan masyarakat dalam hal pemberantasan korupsi di tengah maraknya pemberitaan kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia.

Hal ini menuai banyak tanggapan dari beberapa kalangan yang menganggap PP No. 43/2018 tersebut sebagai bentuk upaya pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk memerangi tindak pidana korupsi dan diharapkan bisa mengurangi maraknya praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan di kalangan pejabat publik. Hal ini turut menimbulkan berbagai komentar dari kalangan politikus, lembaga Negara dan organisasi non- pemerintahan, mengingat Presiden mengesahkannya pada saat musim kampanye pemilihan sehingga banyak yang menilai tindakan Presiden Joko Widodo ini dituding pencitraan oleh kubu Prabowo-Sandiaga.<sup>3</sup> Sehingga banyak menimbulkan spekulasi di kalangan pemerintahan yang beranggapan PP ini sedianya positif dan merupakan langkah yang tepat dilakukan oleh presiden dan ada juga yang menilai Peraturan Pemerintah tentang imbalan bagi pelapor korupsi ini kurang efektif untuk diterapkan dengan alasan, ada beberapa aturan yang harus di detailkan atau beberapa kasus terkait tindak pidana korupsi yang harus lebih dulu diselesaikan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti ingin mengetahui bagaimanakah framing pemberitaan PP No. 43/ 2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di media *online* Kompas.com pada bulan Oktober 2018. Dalam usaha mengetahui bagaimana *framing* yang dibentuk tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul: Analisis *Framing* Pemberitaan PP No. 43/ 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Media *Online* Kompas.com.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana *framing* pemberitaan PP No.43/ 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Media *Online* Kompas.Com. *Framing* diartikan sebagai gugusan ide atau cara pandang atas

suatu isu. Menurut Entman (1991) *framing* bisa ditemukan di banyak tempat misalnya didalam teks media, jurnalis, ruang redaksi media, elit politik, pengambil kebijakan, pengamat politik, individu dan masyarakat. *Framing* sebagai teori efek media memiliki cara pandang atau gugusan ide atas suatu isu yang dapat ditemukan di dalam individu jurnalis dan ruang redaksi, teks berita media, individu khalayak media dan masyarakat. Studi mengenai *framing* bisa dikategorikan kedalam tiga bidang, yaitu pembentukan *framing (framing building)*, efek *framing* pada individu (*framing setting*), dan efek *framing* individu pada masyarakat.

1) Pembentukan *Framing (Frame Building)*

Menurut De Vreese dan Lecheler (2012, 2016), *framing* dalam teks media terbentuk atas dasar faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup kebijakan redaksi, rutinitas media, dan nilai- nilai berita. Kemudian faktor eksternal mencakup kekuatan pengiklanan, konsumen media, intervensi dari pemilik media, pemerintah, organisasi masyarakat dan seterusnya.

2) Efek *framing* Berita pada Individu (*Frame Setting*)

Dalam hal ini *Frame setting* membahas dampak dari pembingkaiian pemberitaan media terhadap individu, pengetahuan, sikap, dan perilaku. Hal ini merupakan studi efek media dimana ketika kita membicarakan *framing* sebagai teori efek media, maka kita mempelajari dampak bingkai media terhadap individu.

3) Efek *Framing* Individu Pada Masyarakat

Efek *framing* individu pada masyarakat ini sering disebut juga sebagai studi gerakan sosial (*social movement*). Studi ini mempelajari bagaimana dampak *frame* individu atas suatu isu mempengaruhi tindakan kolektif dan gerakan sosial di masyarakat. Dampak ini merupakan kelanjutan dari *frame* individual. Ketika individu memiliki pandangan tertentu atas suatu isu (sebagai akibat *framing* media), individu tersebut kemudian mengekspresikan secara bersama- sama dalam bentuk aksi atau demonstrasi. Teori ini pada dasarnya berbicara mengenai faktor- faktor apa yang mendorong seseorang terlibat dalam gerakan sosial.

*Framing* berkaitan dengan pendefinisian suatu realitas. Dilihat dari bagaimana peristiwa dipahami dan siapa yang diwawancarai. Hal ini tentu menimbulkan pendefinisian tertentu atas suatu realitas. Peristiwa yang sama bisa saja berita dan realitas yang berbeda ketika peristiwa tersebut dibingkai dengan cara yang berbeda. Hal ini membuat teori *framing* menunjukkan bagaimana jurnalis membuat simpulatif, prioritas, dan struktur tertentu dari suatu peristiwa. Karenanya, *framing* menyediakan kunci bagaimana peristiwa tersebut dipahami oleh media dan ditafsirkan dalam bentuk berita. Karena media melihat dari sudut pandang tertentu maka realitas setelah dilihat oleh khalayak adalah realitas yang sudah terbentuk oleh bingkai media.

Louis Althusser (1971 dalam Al Zastrouw, 2000) mengatakan bahwa media, dalam hubungannya dengan kekuasaan, menempati posisi yang strategis, karena anggapan memiliki kemampuan sebagai sarana legitimasi. Sehingga saat ini media massa massa merupakan bagian dari alat kekuasaan Negara yang bekerja secara ideologis guna membangun kepatuhan khalayak terhadap kelompok yang berkuasa. Hal ini membuat media (pers) sering disebut sebagai *the fourth estate* (kekuatan keempat) dalam kehidupan sosial- ekonomi dan politik. Hal ini disebabkan oleh suatu persepsi tentang peran yang dapat dimainkan oleh media dalam kaitannya dengan pengembangan kehidupan sosial- ekonomi dan politik masyarakat.

Para pemilik media swasta secara umum memiliki kepentingan finansial dan strategis yang menimbulkan upaya untuk mempengaruhi pengambilan keputusan politik. Tidak jarang mereka memiliki posisi ideologis yang terbuka dan bahkan ambisi politik tersendiri. Dukungan surat kabar untuk partai politik lebih lazim dan terkadang partai politik

mengendalikan surat kabar. Bahkan untuk alasan- alasan pemilu, para politikus sering diwajibkan untuk meminta dukungan media besar.<sup>9</sup> Analisis *framing* cocok digunakan untuk melihat konteks sosial- budaya suatu wacana, khususnya hubungan antara berita dan ideologi, yakni proses atau mekanisme mengenai bagaimana berita membangun, mempertahankan, mereproduksi, mengubah dan meruntuhkan ideologi. Analisis *framing* dapat digunakan untuk melihat siapa mengendalikan siapa dalam suatu struktur kekuasaan, pihak mana yang diuntungkan dan dirugikan, siapa si penindas dan si tertindas, tindakan politik mana yang konstruksional dan inkonstruksional, kebijakan publik mana yang harus didukung dan tidak boleh didukung.

*Framing* pada umumnya ditandai dengan menonjolkan aspek tertentu dan mengaburkan aspek lain dari suatu realitas. Yang secara sadar atau tidak berita kemudian diarahkan pada aspek tertentu yang mengakibatkan aspek lain yang terdapat dalam realitas tersebut tidak mendapatkan perhatian yang memadai. Dari *framing* juga biasanya ditandai dengan memfokuskan pemberitaan pada aktor tertentu sehingga menyembunyikan aktor lainnya, hal ini tentu tidak salah. Namun efek yang akan terlihat adalah ketika memfokuskan pada satu pihak atau aktor tertentu menyebabkan aktor lain yang lebih relevan dalam memberikan pernyataan dalam pemberitaan menjadi tersembunyi. Dalam melakukan penelitian Analisis *Framing* ini, peneliti memilih untuk meneliti teks berita menggunakan model Analisis *Framing* Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki yang membagi empat dimensi struktural teks berita sebagai perangkat *framing*, yaitu struktur sintaksis, struktur skrip, struktur tematik, dan struktur retorik. Keempat dimensi struktural ini membentuk semacam tema yang menghubungkan antara makna proposisi dalam wacana itu dalam dunia nyata.

Tabel 1. Skema *Framing* Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki

STRUKTUR	PERANGKAT <i>FRAMING</i>	UNIT YANG DIAMATI
<b>Sintaksis</b> (Cara wartawan menyusun fakta)	Skema berita	<i>Headline, lead, latar informasi, kutipan, sumber, pernyataan, penutup</i>
<b>Skrip</b> (Cara wartawan mengisahkan fakta)	Kelengkapan berita	5W + 1H ( <i>who, what, when, where, why, dan how</i> )
<b>Tematik</b> (cara wartawan menulis fakta)	Detail, koherensi, bentuk kalimat, kata ganti	Paragraf, proposisi, kalimat, hubungan antar kalimat
<b>Retoris</b> (cara wartawan menekankan fakta)	Leksikon, grafis, metafora	Kata, idiom, gambar atau foto, grafik

Setiap hari ada banyak peristiwa yang terjadi dan semuanya secara potensial menjadi berita. Peristiwa- peristiwa tersebut tidak serta- merta menjadi berita karena media memiliki batasan, sehingga dalam prosesnya peristiwa tersebut akan dipilih mana berita dan mana yang bukan berita. Kemudian setiap berita yang diproduksi oleh para jurnalis tidak semata- mata memindahkan suatu realitas ke dalam bentuk berita.

Menurut pandangan Berger dan Luckmann, tahapan- tahapan dalam proses konstruksi sosial media massa itu terjadi melalui tahap menyiapkan materi, tahap sebaran konstruksi, tahap pembentukan konstruksi dan tahap konfirmasi.<sup>16</sup> Berikut peroses terbentuknya konstruksi sosial media massa melalui empat tahapan penting: (1) Tahap Menyiapkan Materi Konstruksi: Dalam tahap menyiapkan materi, tidak semua peristiwa dapat dijadikan sebuah berita. Hanya peristiwa yang mengandung isu- isu penting yang menjadi fokus media massa. Untuk menyiapkan materi konstruksi ada tiga hal penting dalam penyiapan materi konstruksi sosial *pertama*, keberpihakan media massa kepada kapitalisme. *Kedua*, keberpihakan semu pada masyarakat merupakan cara media untuk menaikkan *rating* penjualan demi kepentingan para pemilik modal. *Ketiga*, keberpihakan pada kepentingan umum. Kepentingan umum merupakan hal yang harus diperjuangkan, terutama oleh media massa yang berfungsi sebagai penyambung lidah rakyat. Akan tetapi, keberpihakan media massa pada kepentingan umum tidak akan pernah terjadi apabila tidak mendatangkan keuntungan yang besar untuk kantung kapitalis;

Selanjutnya ialah tahap sebaran konstruksi, pada tahap ini dilakukan melalui strategi masing- masing media massa. Prinsip utama dari tahap ini adalah *real time*. *Real Time* ialah prinsip aktualisasi media massa dalam memberikan suatu peristiwa, dimana khalayak merasa tepat waktu mengkonsumsi informasi yang disajikan oleh media massa. Jadi prinsip dasar sebaran konstruksi media massa adalah sebuah informasi harus sampai pada pembaca secepatnya berdasarkan agenda media. Apa yang dianggap penting oleh media, menjadi penting pula bagi khalayak.

Tahap Pembentukan Konstruksi, Pada tahap ini pemberitaan telah sampai kepada khalayak dan selanjutnya terjadi pembentukan konstruksi di masyarakat melalui tiga tahap. Tahap pertama, konstruksi membenaran, merupakan tahap dimana khalayak melihat media massa sebagai sebuah kebenaran yang mutlak dan tidak bisa diganggu gugat. Pada tahap ini pikiran masyarakat secara otomatis telah terkonstruksi oleh realitas yang disajikan media massa. Tahap kedua, kesediaan dikonstruksi oleh media massa, dengan mengkonsumsi berbagai informasi yang disajikan oleh media, menunjukkan bahwa seseorang telah bersedia pemikirannya dikonstruksikan media massa. Tahap ketiga, adalah menjadikan media massa sebagai pilihan konsumtif, hal ini terjadi pada seseorang yang memiliki ketergantungan pada media massa, bahkan pada tingkat tertentu, seseorang merasa tidak mampu beraktivitas apabila belum mengkonsumsi berita atau informasi yang disajikan media massa.

Pembentukan konstruksi citra yang dibangun media massa terbentuk dalam dua model yaitu model *good news* dan model *bad news*. Model *good news* adalah sebuah strategi yang cenderung mengkonstruksi sebuah pemberitaan dari sisi baiknya saja. Padahal model ini objek pemberitaanya dikonstruksi sebagai sesuatu yang memiliki citra baik sehingga terkesan lebih baik dan bagus dari yang sesungguhnya. Sedangkan model *bad news* adalah sebuah konstruksi yang cenderung mengkonstruksi sebuah keburukan atau cenderung memberi citra buruk pada objek pemberitaan, sehingga objek yang di konstruksi terkesan lebih buruk, lebih jelek, lebih jahat dan sebagainya. Tahap konfirmasi, Pada tahap ini khalayak dan media massa dituntut untuk memberikan alasan atas pilihannya ikut terlibat dalam tahap pembentukan konstruksi. Media menganggap tahap ini penting karena pada tahap ini dapat menjelaskan atas dasar apa media mengkonstruksi suatu peristiwa. Sedangkan bagi khalayak, tahapan ini juga dianggap penting untuk memberikan alasan mengapa khalayak bersedia untuk dikonstruksi pemikirannya.

Berita dalam pandangan kaum konstruksionis adalah hasil dari konstruksi sosial yang selalu melibatkan pandangan, ideologi, dan nilai- nilai dari wartawan ataupun media. Bagaimana konstruksi realitas dijadikan berita sangat bergantung dari fakta itu dipahami dan

dimaknai. Sehingga berita yang kita baca bukan hanya menggambarkan realitas, bukan hanya menunjukkan pendapat sumber berita, melainkan juga hasil konstruksi dari media itu sendiri. Lewat berbagai instrumen yang dimiliki, media ikut membentuk realitas yang terjadi dalam pemberitaan. Sehingga media adalah agen yang secara aktif menafsirkan realitas untuk diinformasikan kepada khalayak dengan memilih realitas mana yang diambil sehingga dapat menarik minat pembaca dan realitas mana yang tidak diambil. Media juga memilih (secara sadar atau tidak) yang bisa dijadikan berita sehingga hanya sebagian saja dari sumber berita yang tampil dalam pemberitaan. Lewat pemberitaan juga, media dapat membingkai peristiwa tertentu yang pada akhirnya menentukan bagaimana khalayak harus melihat dan memahami peristiwa dalam kacamata tertentu.

Produk berita setiap media pasti memiliki kebijakan masing-masing dalam mengkonstruksi dan menghasilkan berita yang diinginkan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa berita adalah hasil mekanisme kerja individu-individu yang ada dalam media (redaksional) berdasarkan kebijakan, pertimbangan serta ideologi. Fakta atau realitas yang diliput kemudian ditampilkan dalam media lewat pemberitaan. Berita adalah hasil dari konstruksi yang selalu melibatkan pandangan ataupun nilai-nilai dari wartawan dan media yang bersangkutan. Bagaimana sebuah realita dijadikan berita sangat tergantung pada bagaimana ia dimaknai dan dipahami oleh wartawan.

Media *Online* adalah media massa yang tersaji secara *online* di situs web (*website*) internet. Menurut Romli media *online* adalah media massa “generasi ketiga” setelah mencetak (koran, tabloid, majalah, buku) dan media elektronik (radio, televisi, dan film/video).<sup>23</sup> Dalam dunia jurnalistik saat ini pun internet telah melahirkan ilmu jurnalistik baru yaitu *jurnalisme online* yang menggunakan laporan jurnalistik dengan memanfaatkan teknologi internet yang disebut media *online* yang dapat menyajikan informasi cepat dan mudah diakses oleh masyarakat luas dimana saja dan kapan saja.

Jurnalistik *Online* (*Online Journalism*) adalah proses penyampaian informasi melalui internet, utamanya *website*.<sup>25</sup> Sehingga kini jurnalistik juga berlaku di internet atau media *online* sehingga melahirkan ilmu baru bernama jurnalistik *online*. Perbedaan utama jurnalistik *online* dengan “jurnalistik tradisional” (cetak, radio, TV) adalah kecepatan, kemudahan akses, bisa di-*update* dan dihapus kapan saja, dan interaksi dengan pembaca atau pengguna (*user*). Jurnalistik *online* juga tidak mengenal tenggat waktu (*deadline*) sebagaimana dikenal di media cetak. *Deadline* bagi jurnalistik *online* dalam pengertian “publikasi paling lambat” adalah “beberapa menit bahkan detik” setelah kejadian berlangsung.

Keunggulan jurnalistik *online* secara detail dikemukakan oleh James C. Foust dalam bukunya berjudul *Online Journalism: Principles and Practices of News for the Web* (Holcomb Hathaway Publishers, 2005), sebagai berikut:

- a. *Audience control*, yaitu audiens lebih leluasa untuk terlibat langsung dalam memilih dan mencari berita yang diinginkannya.
- b. *Non-linearity*, yaitu informasi yang diberikan bersifat independen. Sehingga dalam memahami suatu peristiwa audiens tidak perlu membaca rangkaian berita lainnya.
- c. *Storage and Retrieval*, yaitu audiens mudah untuk menyimpan dan mengakses kembali informasi-informasi yang ada.
- d. *Unlimited Space*, yaitu memungkinkan jumlah berita jauh lebih lengkap dibandingkan media lainnya karena didukung oleh kapasitas internet yang sangat besar.
- e. *Immediacy*, yaitu informasi dapat diakses secara langsung tanpa perantara orang ketiga sehingga audiens bisa langsung menerima informasi lebih cepat dibanding media lainnya.

- f. *Multimedia Capability*, yaitu menyediakan berbagai jenis informasi seperti gambar, video, audio dan teks.
- g. *Interactivity*, yaitu meningkatkan level interaktivitas antara audiens dengan setiap berita atau informasi yang diakses.

## Metode

Adapun jenis penelitian yang peneliti gunakan yaitu penelitian kualitatif. Subjek dalam penelitian ini yaitu media online Kompas.com bulan Oktober 2018. Objek penelitian adalah pemberitaan mengenai penerbitan Peraturan PP No.43/2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tidak pidana korupsi.

Peneliti mengerucutkan pemberitaan menjadi tujuh berita yang dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu sehingga mewakili *framing* berita yang diberitakan oleh Kompas.com. Pada pengambilan berita yang dijadikan sampel, peneliti menggunakan *purposive sampling*. Sehingga pada penelitian ini, peneliti mempertimbangkan pada aspek sumber yang pro dan kontra juga berdasarkan pengelompokan sumber yang diambil oleh Kompas.com yaitu dari pihak pemerintah, lembaga Negara, lembaga non-pemerintah, dan kedua belah kubu calon presiden 2019.

## Hasil dan Pembahasan

Pada dasarnya *framing* adalah metode untuk melihat cara bercerita (*story telling*) media atas peristiwa. Cara bercerita ini tergambar pada “cara melihat” terhadap realitas yang dijadikan berita. “Cara melihat” ini berpengaruh pada hasil akhir dari konstruksi realitas. Analisis *framing* adalah analisis yang dipakai untuk melihat bagaimana media mengkonstruksi realitas dan juga dipakai untuk melihat bagaimana peristiwa dipahami dan dibingkai oleh media.

Maka penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana Kompas.com melihat dan mengkonstruksi pemberitaan tentang penerbitan PP No. 43 tahun 2018 dengan menganalisis tujuh pemberitaan diatas dengan menggunakan konsep *framing* model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki yang membagi unit analisis kedalam empat struktur yaitu, Sintaksis (cara wartawan menyusun fakta), Skrip (cara wartawan mengisahkan fakta), Tematik (cara wartawan menulis fakta) dan Retoris (cara wartawan menekankan fakta).

Analisis struktur sintaksis terkait pemberitaan PP No. 43 tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Tabel 2. Pembahasan Struktur Sintaksis

Elemen	Kompas.com
<i>Headline</i>	Tidak hanya pernyataan dari sumber yang dijadikan sebagai <i>headline</i> untuk menarik perhatian pembaca, namun Kompas.com juga menarik perhatian pembaca dengan membangkitkan rasa ingin tahu pembaca mengenai PP tersebut dengan mengaitkan fakta yang terjadi dan apa yang menjadi sorotan masyarakat.

<b>Lead</b>	Dengan menempatkan <i>lead</i> untuk memberikan sudut pandang dari suatu berita, Kompas.com menarik perhatian pembaca dengan menampilkan <i>lead</i> yang menggambarkan pernyataan yang disampaikan oleh sumber. Sehingga penggunaan <i>who lead</i> merupakan cara yang efektif dalam menyusun fakta dan menarik perhatian pembaca.
<b>Latar Informasi</b>	Dari ketujuh berita yang diteliti latar informasi yang digunakan oleh Kompas.com diambil dari pernyataan sumber yang dilengkapi dengan pernyataan terkait.
<b>Kutipan Sumber</b>	Belum memenuhi <i>cover both side</i> karena ditemukan empat berita yang hanya menggunakan satu pernyataan sumber.
<b>Penutup</b>	Dalam menyusun fakta berdasarkan elemen penutup, Kompas.com mengakhiri teks di dalam berita dengan cara yang berbeda-beda di setiap teksnya dengan menjelaskan isi PP No. 43/ 2018 yang di ambil dari sumber lain, dan menutup dengan pernyataan narasumber.

Dapat disimpulkan bahwa Kompas.com dalam pemberitaannya berusaha menampilkan keberimbangan berita melalui sudut pandang pihak yang pro dan kontra dalam menanggapi PP tersebut. Sehingga memungkinkan Kompas.com mengemas pemberitaan tersebut secara rinci dan sesuai dengan fakta yang ada dan didapat dari sumber. Sudut pandang itu sendiri diambil dari pernyataan pemerintah, tokoh- tokoh politikus kedua belah kubu capres, lembaga Negara yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi dan organisasi masyarakat anti-korupsi.

Tabel 3. Pembahasan Struktur Sintaksis

<b>Elemen</b>	<b>Kompas.com</b>
<b>What</b>	Pernyataan sumber menjadi tema utama di setiap berita. Diikuti dengan fakta terkait yang hanya menjadi keterangan tambahan.
<b>Where</b>	Kompas.com menyajikan berita dari lokasi yang berbeda- beda. Namun dari kelima berita tersebut terdapat dua berita yang tidak menyatakan tempat.dan Kompas.com menulis keterangan informasi yang didapat tersebut dengan memberikan keterangan bahwa pernyataan sumberdidapat melalui pesan tertulis atau pesan singkat.
<b>When</b>	Sesudah PP No. 43 Tahun 2018 diteken oleh Presiden Joko Widodo.
<b>Who</b>	Kompas.com melibatkan pemerintah, tokoh politikus kedua belah kubu, lembaga Negara dan lembaga non pemerintahan yang bekerja mengawasi korupsi di Indonesia.
<b>Why</b>	Penerbitan PP No. 43 Tahun 2018 telah menimbulkan berbagai penilaian yang pro dan kontra.
<b>How</b>	Hanya menjelaskan dari sudut pandang sumber yang memberikan masukan dan saran untuk lebih mendetailkan lagi PP tersebut dan bagaimana seharusnya langkah yang diambil pemerintah dalam memberantas kasus korupsi di Indonesia.

Struktur skrip dari ketujuh berita yang ditampilkan Kompas.com terlihat hanya berfokus dari pernyataan sumber, sehingga menempatkan unsur *who* sebagai gagasan utama pemberitaan tentang PP No. 43 Tahun 2018. Yang disampaikan oleh Juru bicara KPK Febri Diansyah,

Presiden Joko Widodo, Koordinator Juru Bicara BPN Prabowo- Sandiaga yaitu Dahnil Anzar, Wakil ketua kampanye Nasional Jokowi- Ma"ruf yaitu Arsul Sani dan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Bonyamin Saiman, Tama Satrya selaku Koordinator Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW dan latar berita ketujuh diambil dari pernyataan Muhammad Prasetyo selaku pihak dari Kejaksaan Agung. Kompas.com menampilkan detail berita yang berisikan bentuk alasan setuju dan tidaksetujunya tokoh yang diwawancarai dengan adanya PP No.43 tahun 2018 ini. Konstruksi berita yang dibentuk oleh Kompas.com dengan menampilkan pihak yang pro dan kontra dengan diterbitkannya PP tersebut digunakan untuk mengarahkan pembaca agar turut menilai kebijakan pemerintah yang memberikan imbalan bagi pelapor kasus korupsi untuk memberantas kasus korupsi dan dampak apa yang ditimbulkan dari penerbitan PP tersebut.

Tabel 4. Pembahasan Struktur Sintaksis

<b>Elemen</b>	<b>Kompas.com</b>
<b>Detail</b>	Berdasarkan detil dalam Pemberitaan PP No.43/2018 ini Kompas.com berusaha memperkecil keberpihakannya dengan menampilkan informasi dari pihak yang pro maupun yang kontra dengan memberikan ruang dalam bentuk apresiasi, masukan dan kritik yang diambil dari sumber yang memberikan pernyataan.
<b>Koherensi</b>	Koherensi yang digunakan Kompas.com bertujuan untuk memberikan kesan bahwa tokoh politik dan lembaga terkait yang memberikan pernyataan menilai bahwa penerbitan PP tersebut sedianya baik, namun Pemerintah harus lebih mempertimbangkan lagi ketentuan pasal yang dibuat dan memperhatikan juga kasus- kasus besar mengenai tipikor yang belum tuntas penyelidikannya di Indonesia.
<b>Bentuk kalimat</b>	Bentuk kalimat yang digunakan Kompas.com secara keseluruhan menggunakan kalimat aktif dengan meletakkan sumber sebagai subjek dari pernyataannya mengenai PP No.43 tahun 2018.
<b>Kata Ganti</b>	Kata ganti yang digunakan Kompas.com adalah kata ganti orang ketiga tunggal yaitu dia dan ia yang menunjuk kepada sumber. Kata ganti orang pertama jamak yaitu kita dan kami yang menunjuk kepada sumber dan khalayak, kami yang menunjuk kepada sumber dan lembaganya. Kemudian kata ganti orang ketiga jamak yang menunjuk kepada pelaku korupsi. kata ganti ini digunakan untuk membuat kalimat dalam berita lebih efektif dan tidak terkesan mengulang-ulang kata atau kalimat.

Secara keseluruhan berdasarkan analisis pada struktur tematik, Kompas.com memuat pernyataan pro dan kontra dari sikap pemerintah, kedua belah kubu dari calon presiden, KPK, Kejaksaan Agung, ICW dan MAKI, yang menjadi wacana utama dalam pemberitaan terkait PP No. 43 tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dimana pada paragraf awal, dari keseluruhan berita menjelaskan tentang pernyataan pro dan kontra yang disampaikan oleh sumber dan alasannya mengapa mereka setuju dan tidak menyetujui kehadiran PP tersebut, dan sebab- akibat dari diterbitkannya PP yang mengatur soal imbalan bagi pelapor kasus korupsi. Kemudian diparagraf selanjutnya, Kompas.com menampilkan kritik dan masukan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dalam memberantas kasus korupsi yang diambil dari pernyataan sumber.

Tabel 5. Pembahasan Struktur Sintaksis

Elemen	Pembahasan
<b>Leksikon</b>	Pemilihan kata yang digunakan Kompas.com digunakan untuk memberikan penekanan terhadap pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca, dilihat dari penggunaan kata „sorotan, patut, imbalan dan kompensasi.“
<b>Grafis</b>	Grafis yang ditampilkan Kompas.com dari ketujuh berita sebagian sudah sesuai dengan judul dan isi berita, walaupun terdapat satu berita yang menampilkan gambar yang tidak sesuai dengan isi dan judul pemberitaan.
<b>Metafora</b>	Metafora yang digunakan menunjukkan bentuk keresahan atas diterbitkannya PP tersebut yang bisa menimbulkan dampak negatif bagi relawan anti-korupsi Indonesia.

Dari struktur retorik dalam ketujuh berita tersebut dapat disimpulkan bahwa Kompas.com berusaha menonjolkan fakta mengenai imbalan uang yang diberikan dan bagaimana perlindungan yang diberikan dan dampak kepada pelapor dengan menggunakan pemilihan kata, ungkapan dan grafis untuk menggambarkan dampak dari penerbitan PP Nomor 43 tahun 2018 tersebut.

Hasil analisis *framing* pemberitaan PP Nomor 43/ 2018 di media *online* Kompas.com melalui tujuh berita yang diteliti, jika dilihat dari *cover both side* ditemukan terdapat empat berita yaitu teks berita pertama mengenai KPK Mengapresiasi PP yang mengatur soal penghargaan pelapor kasus korupsi, diberita kedua mengenai alasan Jokowi teken PP yang mengatur soal imbalan uang bagi pelapor korupsi, di teks berita keenam dan ketujuh terlihat hanya menggunakan satu kutipan sumber dalam penulisan berita sehingga terlihat mengesampingkan keberimbangan berita. Hal ini juga dikarenakan media *online* merupakan media yang menyajikan informasi dengan cepat. Dimana dalam karakteristik jurnalistik *online* menurut Mike Ward dalam *Journalism Online* mengatakan bahwa keunggulan jurnalistik *online* adalah kesegaran dan kecepatan penyampaian informasi, sehingga tiap menit bahkan dalam hitungan detik, sebuah berita dapat diposting.<sup>30</sup> Sehingga dalam penyajiannya, media *online* melakukan *cover both side* dilakukan pada berita selanjutnya. Dari ketujuh berita tersebut Kompas.com memuat pernyataan sumber sebagai wacana utama dalam memberitakan Peraturan Pemerintah tersebut.

Setelah menganalisis pemberitaan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2018, peneliti kemudian meninjau dari konsep ideologi dan hegemoni media dimana setiap media pasti memiliki ideologi dan kepentingan yang ingin disampaikan kepada pembacanya. Sehingga dari ideologi media ini biasanya media akan membingkai suatu pemberitaan sesuai dengan ideologi yang dipegangnya.

Seperti yang diungkapkan dalam kajian terdahulu mengenai “Perbandingan Pemberitaan Seputar Kebijakan Tax Amnesty di Media *Online* Kompas.com dan Viva.com” yang mengatakan bahwa terkait ideologi media, berita *online* Kompas.com yang didirikan oleh P.K Ojong dan Jacob Oetama menurut Suara Islam Online pada pilpres 2014 telah memihak kepada Jokowi. Sedangkan yang diketahui bahwa pendiri Kompas bukanlah anggota sebuah partai yang dapat mempunyai kepentingan dalam memihak suatu pasangan calon Presiden. Akan tetapi Jacob Oetama merupakan seorang pengusaha besar yang mempunyai kepentingan dalam bentuk keuntungan bisnis dan tempat strategis dalam menjalankan tujuannya.

Berdasarkan penilaian dari tujuh berita yang dianalisis terkait pemberitaan mengenai PP No. 43/ 2018, terlihat bahwa Kompas.com berupaya mengedepankan keberimbangan berita dengan mengambil sudut pandang tidak hanya dari pihak pemerintah saja, namun mengambil

sudut kedua dari kedua belah kubu yaitu kubu Prabowo-Sandiaga dan kubu Jokowi- Ma'ruf Amin, lembaga negara seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung dan organisasi kemasyarakatan yang bekerja untuk melawan korupsi di Indonesia seperti Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dan ICW.

Sehingga dari ideologi yang digunakan Kompas.com dalam memberitakan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, Kompas.com terlihat berusaha tidak menunjukkan kepentingan politik maupun ekonomi di dalam pemberitaan tersebut. Dilihat dari pengambilan sudut pandang yang beragam dari pihak yang pro dan kontra maupun lembaga yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi ini, dan penulisan fakta yang ditulis dalam pemberitaan mengenai PP No. 43/ 2018 ini. Kompas.com dinilai telah berupaya memperkecil pengaruh kepentingan media dengan kepentingan ekonomi dan politik penguasa dalam memberitakan PP tersebut.

Kepentingan ekonomi dan politik media yang digunakan Kompas.com dalam penelitian ini memiliki kesamaan dengan peneliti terdahulu bahwa dalam menyampaikan berita Kompas.com berusaha memperkecil dan tidak memperlihatkan kepentingannya terhadap pemerintah. Seperti yang diungkapkan dalam penelitian sebelumnya mengenai “Konstruksi Berita Tahun Kinerja Jokowi- JK” pada Portal media *Online* Kompas.com.” Dimana peneliti tersebut menyatakan bahwa netralitas sangat diperlukan dalam suatu media untuk menjaga keakurasian berita, namun nyatanya banyak media saat ini memiliki kepentingan ekonomi maupun politik terhadap para pelaku politik di Indonesia dan melupakan fungsi media itu sendiri. Kompas.com dengan kepintarannya tidak memperlihatkan hal tersebut, dengan menampilkan keberimbangan antara berita positif dan negatif, walaupun dalam penelitian ini sebelumnya menyatakan telah menemukan kecenderungan Kompas.com memberitakan sisi positif kinerja Jokowi- JK. Karena tidak ada media yang tidak memiliki kepentingan tertentu di era globalisasi ini.

Sedangkan dilihat dari konstruksi realitas media, Kompas.com cenderung lebih membahas isi pasal yang memberikan imbalan sebesar 200 Juta kepada pelapor kasus korupsi dan bagaimana bentuk keamanan yang akan diberikan kepada pelapor, dengan menampilkan sudut pandang dari pihak yang pro dan kontra terhadap kehadiran Peraturan Perintah Nomor 43 tahun 2018 ini. Konstruksi yang dilakukan Kompas.com ini juga dilihat dari adanya penggunaan kata sorotan dan menyoroti” diberita kedua dan ketiga dengan contoh kalimat. Poin yang menjadi sorotan di dalam PP 43/2018 itu adalah masyarakat yang memberikan informasi kepada penegak hukum mengenai dugaan korupsi, akan mendapatkan penghargaan dalam bentuk piagam dan premi yang besarnya maksimal Rp 200 juta.” Kemudian diberita kelima “Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menyoroti Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2018.”

Sehingga dalam hal ini Kompas.com terlihat mengkonstruksi realitas sosial di masyarakat dengan melibatkan pembaca untuk lebih dekat dengan melihat realitas yang terjadi mengenai apa yang menjadi perhatian di dalam PP yang melibatkan masyarakat dalam memberantas korupsi tersebut melalui pernyataan sumber yang pro dan kontra. Sehingga dalam pendekatan pembentukan berita (Creation of news) disini wartawanlah yang membentuk peristiwa. Dimana wartawan bukanlah perekam yang pasif yang mencatat apa yang terjadi dan apa yang dikatakan seseorang, melainkan wartawan berinteraksi dengan dunia (realitas) dan dengan orang yang diwawancarai, dan sedikit banyaknya menentukan bagaimana bentuk dan isi berita yang dihasilkan.

Jika dibandingkan dengan kajian terdahulu “Perbandingan Pemberitaan Seputar Kebijakan

*Tax Amnesty* di Media Online Kompas.com dan Viva.com” dengan penelitian ini peneliti menemukan perbedaan mengenai hasil yang didapat dari analisis *framing* pada media *online* Kompas.com dalam mengkonstruksi dan memberitakan tentang kebijakan- kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Dalam penelitian ini, dari tujuh berita yang telah dianalisis peneliti menemukan bahwa Kompas.com menampilkan informasi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2018 dengan lebih menonjolkan isi pasal yang mengatur soal imbalan uang dan bentuk perlindungan bagi pelapor kasus korupsi dengan mengkaji sebab- akibat dari diterbitkannya Peraturan Pemerintah tersebut dengan beberapa catatan bahwa PP tersebut harus lebih di detailkan lagi mengenai jumlah imbalan dan bentuk perlindungan yang diberikan kepada pelapor melalui pernyataan sumber. Kompas.com juga menampilkan dampak positif, negatif, kritik dan saran yang dikutip dari pernyataan sumber yang pro dan kontra terhadap kebijakan pemerintah terkait penerbitan PP tersebut. Sehingga Kompas.com terlihat berusaha mengedepankan keberimbangan dan berupaya memperkecil pengaruh kepentingan media dengan kepentingan ekonomi dan politik dalam memberitakan PP tersebut.

Sedangkan dalam kajian terdahulu yang menganalisis tentang pemberitaan kebijakan *tax amnesty* yang di keluarkan oleh pemerintah, Kompas.com hanya menggunakan sumber dari sisi pemerintah sehingga dalam memberitakannya Kompas.com lebih condong membangun citra pemerintah yang berusaha membuat program *tax amnesty* agar diterima oleh masyarakat yang kontra terhadap kebijakan tersebut.

## Simpulan

Kompas.com dalam membingkai pemberitaan PP No. 43/2018 terlihat lebih menonjolkan isi pasal yang mengatur soal imbalan uang dan bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan kepada pelapor kasus korupsi dengan mengkaji sebab- akibat dari diterbitkannya Peraturan Pemerintah tersebut melalui pernyataan sumber yang diwawancarai. Kompas.com juga menampilkan alasan penerbitan PP no.43/2018 serta dampak positif, negatif, kritik dan saran yang dikutip dari pernyataan sumber yang pro dan kontra terhadap kebijakan pemerintah terkait penerbitan PP tersebut. Kompas.com dinilai telah berupaya memperkecil dan mengaburkan pengaruh kepentingan media dengan kepentingan ekonomi dan politiknya dalam memberitakan PP yang mengatur soal imbalan bagi pelapor kasus korupsi, dilihat dari bagaimana Kompas.com mengambil sudut pandang sumber yang beragam.

## Referensi

- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- . *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Eriyanto. *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: LKiS Printing Cemerlang, 2002.
- . *Analisis wacana Pengantar Analisis teks media*. Yogyakarta: LKiS Printing cemerlang, 2011.
- . *Media dan Opini Publik*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Kriyantono, Rahmat. *Teknik Praktik Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana, 2012.
- McQuail, Denis. *Teori Komunikasi Massa*. Jakarta: Salemba Humanika, 2011.
- Romli, Asep syamsul M. *Jurnalistik Online Panduan Mengelola Media Online*. Bandung: Nuansa Cendekia, 2018.

- Sobur, Alex. *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, Analisis Framing*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Sepriyanto, Ary dkk. "Perbandingan Pemberitaan Seputar Kebijakan Tax Amnesty di Media Online Kompas.com dengan Viva.com." *ejurnal.unisri.ac.id*, 2017: 1.
- Widya, Hanifah Rachman. *Konstruksi Berita '3 Tahun Kinerja Jokowi- JK' Pada Portal Media Online Kompas.com (Analisis Framing Model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki Pada Portal Media Online Kompas.com Edisi 1 Oktober- 31 Oktober 2017)*. Skripsi, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018.
- Alexa An Amazon.com Company. *Top Sites In Indonesia*. January 30, 2019. [www.alexacom/topsites/countries/ID#](http://www.alexacom/topsites/countries/ID#) (accessed January 30, 2019).
- Hakim, Rakhmat Nur. *Kubu Prabowo-Sandiaga Kritik PP Pelaporan Korupsi yang Dapat Ganjaran Rp 200 Juta*. 10 10, 2018. <https://nasional.kompas.com/read/2018/10/10/18421241/kubu-prabowo-sandiaga-kritik-pp-pelaporan-korupsi-yang-dapat-ganjaran-rp-200> (accessed 8 1, 2019).
- Kuwado, Fabian Januarius. *Ini Alasan Jokowi Teken PP yang Mengatur Soal Imbalan Uang Bagi pelapor Korupsi*. Oktober 10, 2018. <https://nasional.kompas.com/read/2018/10/10/12434391/ini-alasan-jokowi-teken-pp-yang-mengatur-imbalan-uang-bagi-pelapor-korupsi> (accessed Mei 02, 2019).
- Prasetyo, Aji. *Hukum Online.com*. Oktober 10, 2018. <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5bbd0fa864a45/ini-poin-penting-pp-penghargaan-bagi-pelapor-korupsi/> (accessed Desember 02, 2018).